

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI KOTA PALU

Abd. Wahid

abd.wahid_disdik@yahoo.co.id

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Tadulako)

Abstract

The purpose of the research is to be achieved : To determine and analyze the Policy Implementation Assistance Fund Operating Expenses (BOS) in Palu , the research method used is qualitative , and in this study there were some informants who understand the problems studied , as for who is the informant here is as follows: Head of Education Palu , Head of Basic Education , the School Committee , the Parent recipient BOS, Elementary School Principal and Principal of Instruction Petobo SDN 06 Lolu , type of data used is primary data and secondary data . Data was collected through observation , interviews , and documentation . The researchers of this study suggest several research results , communication is one of the main factors in policy implementation , communication becomes a major pathway for the implementation of each program . Human resources are the main factors that should be held by each institution or unit both government and non-government institutions , Vice versa if the perspectives of the different implementing the decision makers , the process of implementation of a policy becomes increasingly sulit.dan In case - such cases the executor will use discretion and sometimes subtle ways to inhibit , or will benefit each individual in the process of policy implementation .

Keywords: *Communication , Resources , Disposition and Bureaucracy*

Dikaitkan dengan penandasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, maka peserta didik tingkat Pendidikan Dasar akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah. Biaya Operasional Sekolah yang langsung dikelola oleh sekolah yang meliputi biaya pendaftaran, iuran bulanan, biaya ujian, bahan dan biaya praktek. Biaya tersebut diatas tidak termasuk untuk biaya investasi seperti pengadaan sarana dan prasarana sekolah, gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya serta biaya untuk peningkatan mutu guru. Selain itu penerimaan dana BOS juga diharapkan mampu meningkatkan proses pembelajaran.

Dalam pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palu telah diberikan kepercayaan oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk mengelola dan menyalurkan. Dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut Dinas Pendidikan Kota Palu bekerja sama dengan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Usaha Pos X Sulawesi

Tengah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pendistribusian kepada sekolah-sekolah di daerah terpencil. Namun dalam proses penyaluran dana BOS dari tahun ke tahun mengalami perubahan.

Setiap sekolah tentunya akan menerapkan kebijakan sendiri-sendiri dalam mengelola dana BOS yang telah diterima dari Dinas Pendidikan Kota Palu, sehingga dengan adanya kebijakan yang berbeda antara sekolah yang satu dengan yang lain akan membawa dampak dalam peningkatan poses pembelajaran. Sarana faktor pendukung juga dapat mempengaruhi dalam peningkatan poses pembelajaran. Hal tersebut dapat terlihat dalam pengelolaan dana BOS yang telah diterima. Pada dasarnya danas BOS yang telah diterima oleh sekolah, dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan proses pembelajaran, walaupun dalam acuan atau panduan yang telah ditetapkan telah ditentukan poin-poinnya.

Pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Panduan Pelaksanaan BOS yang diterbitkan setiap tahun oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama sebagai departemen teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Leo Agustino, S.Sos, M.Si (2008;139), beliau menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dalam panduan tersebut dijelaskan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang berasal dari realokasi dana subsidi BBM (PKPS-BBM) di bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain. Dengan BOS diharapkan siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar Sembilan tahun. Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia. Hal tersebut juga telah di atur dalam PERMENDIKNAS No. 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2013.

Sejatinya, program BOS bertujuan agar seluruh siswa SD dan SMP negeri bebas dari pungutan biaya operasional sekolah, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin. Adapun bagi siswa sekolah swasta, BOS diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya operasional sekolah. Pembebasan ataupun peringanan biaya operasional sekolah tentunya mutlak perlu dinikmati oleh para pelajar tanpa hambatan prosedural dan kejahatan korupsi. Bila kemacetan penyaluran dana BOS saja bisa sangat mengganggu hak pendidikan para pelajar, apalagi dengan

kejahatan penyelewengan dan korupsi. Hal itu sama saja berarti melanggar hak konstitusional para pelajar.

Pencapaian hasil belajar siswa pada Sekolah Dasar baik swasta maupun negeri cenderung menunjukkan peningkatan, yang diakibatkan antara lain tersedianya literatur yang digunakan oleh guru dan murid, bahan ajar serta sudah tepatnya guru dalam menggunakan media pembelajaran, serta adanya Dana BOS oleh pemerintah. Dengan adanya dana BOS yang diperuntukan dalam meningkatkan proses pembelajaran, memberikan nilai tambah dan motivasi kepada sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dana BOS diperlukan dalam pencapaian hasil belajar.

Pada dasarnya pemilihan teknik dan model implementasi kebijakan dapat dilihat pada dua jenis pemilihan yaitu pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (*top-bottom*) versus dari “Bawah ke atas (*bottom-top*), dan pemilihan implementasi yang berpola paksa (*command-and-control*) dan Mekanisme pasar (*economic incentive*).

Kebijakan sering dihubungkan dengan tingkat produktifitas yang menunjukkan resiko *input* dan *output* dalam organisasi, bahkan dapat dilihat dari sudut *performance* dengan memberikan penekanan pada nilai efisiensi yang dikaitkan dengan kualitas output yang dihasilkan oleh para pegawai berdasarkan beberapa standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi yang bersangkutan.

Kebijakan juga merupakan kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Pengertian ini menjelaskan bahwa Kebijakan adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Jika dirujuk pada pengertian ini, maka pengertian Kebijakan dapat diartikan sebagai hasil-hasil yang dicapai oleh individu dalam melaksanakan tugas yang telah diembankan kepadanya.

Kebijakan adalah suatu penentuan penetapan standar dari kerja aktifitas yang dilakukan setiap hari berdasarkan proses masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), manfaat (*outcome*) dan keuntungan (*benefit*) dalam menghasilkan suatu kinerja optimal dan berkualitas.

Kebijakan dapat dimaknai sebagai implementasi dari kegiatan perencanaan, pemograman, pengelolaan, monitoring, pelaporan, dan evaluasi atau penilaian. Yang mana menyarankan bahwa aktifitas ini harus sejalan dengan percepatan tujuan yang efisiensi, efektif dan produktif atau dengan kata lain sebagai bagian dari *input, proses, output, outcome dan benefit*.

Untuk melakukan pengkajian sesuai dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Dinas Pendidikan Daerah Kota Palu dalam Penyaluran Bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) di Kota Palu. peneliti memakai teori Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur, yakni: (a) Komunikasi, (b) Sumber Daya, (c) disposisi, dan (d) Struktur Birokrasi. Keempat variabel ini saling berhubungan satu sama lainnya.

1. Komunikasi. Kebershasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran;
2. Sumber Daya. Titik sentral dari Jalan tidaknya kebijakan terletak pada sumber daya. Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut

dapat berwujud sumber daya manusia, yakni potensi dan kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas dan menjadi dokumen semata.

3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan akan berjalan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perpektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Struktur Birokrasi turut memberikan andil terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standars Operating procedures atau SOP*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti menemukan masalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Kebijakan dalam Penyaluran Bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) di Kota Palu?.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, yakni suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada di lokasi penelitian. Menurut kendala apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2002: 309). Penelitian yang dimaksud tidak hanya

terbatas pada pengumpulan data tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. selain itu semua data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang akan disampaikan harus di pahami dengan baik oleh pelaksananya. Dengan demikian kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dan disebarkan dengan jelas, akurat dan konsisten serta tidak menimbulkan kontradiksi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Untuk menjamin keberhasilan dan efektifnya suatu kebijakan itu diperlukan sumber daya yang cukup.

Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan yang diberikan oleh sekolah, dan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yaitu dengan adanya komite sekolah. Komite sekolah disini bertindak sebagai pengawas jalannya penyaluran dana BOS di SDN Inpres Petobo dan SDN inpres 6 Lolu Kota Palu.

Implementasi Kebijakan menurut Edward III yaitu mengenai Komunikasi berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa tindakan merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah Kota Palu dalam rangka menciptakan pendidikan yang berkualitas. Selain itu apabila setelah pelaksanaan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan masalah yang tengah dihadapi masyarakat maka dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan tersebut telah gagal. Suatu kebijakan publik juga bisa mengalami ketidakefektivan dalam jangka pendek disebabkan karena beberapa faktor diantaranya kebijakan yang dilakukan tidak optimal dan detail.

Implementasi Kebijakan dana BOS ini juga berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) karena pemerintah Kota Palu juga harus bisa membedakan alokasi dana BOS ini yang disebabkan oleh suatu kondisi demografi sekolah-sekolah yang masuk ke dalam sekolah penerima dana BOS. Karena setiap sekolah memiliki kondisi demografi yang berbeda karena dengan kondisi demografi yang berbeda akan mempengaruhi Kebijakan dana BOS itu sendiri. Contohnya, SDN Inpres petobo yang berada di kecamatan palu selatan kebutuhannya berbeda dengan SDN yang berada di tengah-tengah kota. Mungkin alokasi dana operasional yang dibutuhkan SDN yang berada di pelosok jauh lebih besar daripada SDN yang berada di tengah-tengah kota. Hal tersebut disebabkan karena fasilitas SDN yang berada di pelosok masih minim, jarak tempuh ke sekolah masih menemui hambatan. Selanjutnya yaitu masalah tim manajemen sekolah dalam program dana BOS di Kota Palu ini juga merupakan faktor penting bagi proses kebijakan BOS Kota Palu. Manajemen sekolah lah yang tahu kebutuhan para siswa-siswi di SDN Inpres Petobo dan SDN inpres 6 lolu di Kota Palu.

Sumber Daya

Implementasi suatu kebijakan cenderung menjadi tidak efektif, meskipun perintah-perintah implementasi diteruskan (ditransmisikan) secara cermat, jelas dan konsisten, apabila memiliki kekurangan sumber-sumber yang diperlukan oleh pelaksana untuk menjalankan kebijakan-kebijakan. Adapun sumber-sumber yang dimaksud adalah; staf yang memadai, keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas serta wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul guna melaksanakan pelayanan publik.

Berdasarkan observasi penelitian menunjukkan bahwa jumlah staf masih terbilang cukup dalam menjalankan kebijakan, mengingat sumberdaya yang paling esensial dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf yang cukup serta keterampilan-keterampilan dalam penyaluran dana bantuan sekolah SD. Dengan demikian tidaklah cukup hanya dengan jumlah pelaksana yang memadai untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi harus memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian diketahui bahwa jumlah staf pada Dinas Pendidikan Kota Palu tidak cukup memiliki keahlian dibidang tugasnya karena pada umumnya adalah lulusan pendidikan umum. Hal itu terjadi karena proses penerimaan pegawai atau staf pada Dnas Pendidikan Kota Palu tersebut adalah merupakan suatu limpahan dari hasil penjangkaran penerimaan pegawai yang terkesan bersifat *spoill system*, sedangkan pihak tersebut tidak memiliki diklat internal melakukan upaya pendidikan dan pelatihan yang sifatnya teknis kepada pegawai tersebut dalam rangka melakukan penyesuaian dengan pekerjaan yang dihadapinya.

Dari hasil observasi lapangan menunjukkan adanya kejelasan yang berkaitan dengan ketidakmampuan sumber daya aparat terutama dalam hal melakukan

pemutakhiran data penerima bantuan khususnya pihak sekolah penerima bantuan BOS yang mestinya hanya menerima bantuan tidak beberapa kali, tetapi ini berlangsung beberapakali dalam setahun. Hal itu terjadi disebabkan kurangnya kunjungan kelapangan yang dilakukan oleh aparat atau implementor untuk turun kelapangan untuk melihat kelayakan permohonan, sehingga yang dikelola oleh pihak sekolah dasar dapat diberi bantuan berkelanjutan dalam setiap tahun. Akan tetapi tidak dilakukan oleh implementor, dan terkesan hanya melakukan verifikasi administratif dengan mengaksistensi melalui proposal yang diajukan oleh pemohon. Karena sarana yang kurang cukup untuk melakukan peninjauan dilapangan bagi pemohon dana bantuan sekolah, serta luasnya wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, mengakibatkan terbatas untuk melakukan verifikasi pada proposal pemohon dan tidak dilakukan kunjungan kelapangan untuk melihat kelayakan untuk mendapatkan bantuan.

Hal tersebut menjadi bukti nyata, bahwa sumber daya yang kurang, serta sumber daya materi atau sarana dan prasarana dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yang efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kewenangan, empati dan etika para aparat. Dan salah satu unsur utama yang sangat perlu dipertimbangkan untuk perbaikan proses administrasi proposal pelayanan publik adalah masalah staf, namun perlu diingat bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi kebijakan berhasil.

Disposisi

Menurut asumsi peneliti perlu dilakukan upaya pemahaman akan uraian tugas yang akan menjadi tanggungjawab terhadap staf/pegawai terlebih dahulu, sebelum masuk bekerja atau menduduki suatu jabatan tersebut melalui pelatihan, sehingga mereka bekerja secara professional dan bertanggungjawab. Selanjutnya perlu adanya suatu motivasi

aparatus dalam hal meningkatkan kinerja aparatus dengan cara menerapkan konsep *punishment* dan *reward*, sehingga mendorong aparatus agar berprestasi lebih baik. Dan berikutnya aparatus memiliki kewenangan yang cukup dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan inovasinya. dalam bekerja sebagai abdi masyarakat dan abdi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas seharusnya di era desentralisasi ini pemerintah tidak cukup hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bersifat otonom, melainkan juga perlu diikuti dengan pembenahan sikap pegawai sebagai pelaksana kebijakan untuk mempunyai inovasi, kreatifitas dan profesionalitas dalam bekerja. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya reformasi birokrasi dan reformasi pegawai dalam mengelola pemerintahan daerah sesuai visi misi bapak Walikota Palu.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi atau organisasi adalah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik, karena akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi yang dialokasikan di dalam organisasi. Struktur birokrasi akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara orang melaksanakan tugasnya (bekerja) dalam organisasi. Ketika arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah di desain, maka yang perlu di perhatikan bagaimana organisasi tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya.

Pada Dinas Pendidikan Kota Palu ditinjau dari segi bentuknya menggunakan struktur organisasi lini dan staf, sehingga terdapat dua macam aparatus yakni staf yang tidak mempunyai bawahan dan karyawan yang memiliki hak memerintah atau lini yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretris Kepala Bagian, dan kepala Seksi yang masing-masing mempunyai bawahan.

Struktur Organisasi sangat menentukan dinamika organisasi. Secara teoritis, suatu bentuk struktur organisasi sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor menurut teori kontingensi, yaitu ukuran organisasi, perbedaan dalam unit-unit organisasi, stabilitas lingkungan, tujuan organisasi itu sendiri, karakteristik tugas-tugas yang ada dalam organisasi, karakteristik tenaga kerja dan pendekatan serta gaya manajemen yang dianut. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dilaksanakan dalam konteks organisasional. Artinya organisasi merupakan wahana dan wadah melalui mana berbagai kegiatan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti yang berkaitan dengan struktur birokrasi menetapkan bahwa struktur atau desain organisasi yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palu adalah masuk kategori birokratik atau mekanistik yang selanjutnya menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan Bantuan Sekolah tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada jawaban responden belum memenuhi harapan sebagaimana yang diinginkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa struktur organisasi, tujuan, visi dan misi organisasi yang diamanatkan oleh Bantuan Dana Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Kota Palu belum dipahami oleh seluruh implementor atau pelaksana kebijakan. Organisasi modern sekarang ini tidak lagi menempatkan struktur organisasi secara kaku dalam mengatur dan menempatkan orang dalam organisasi. Karena pengaruh kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesat tidak memungkinkan struktur menjadikan anggota organisasi menjadi terkungkung. Oleh karena itu perlu di desain suatu struktur organisasi yang ramping dan terbuka layaknya sebagai suatu sistem organisme sehingga lebih fleksibel dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Sehubungan dalam konteks tersebut, maka implementasi kebijakan

penyaluran Dana Bantuan Sekolah (BOS) perlu dipertimbangkan dengan suatu desain struktur organisasi yang fleksibel, efisien dan efektif dalam mengimplementasi suatu kebijakan untuk mewujudkan adanya suatu pelayanan yang berkualitas.

Desain struktur organisasi di Dinas Pendidikan Kota Palu pada dasarnya sudah plat atau datar, yakni tingkatan struktur sederhana, hanya saja tidak disertai dengan diskresi yakni adanya kewenangan yang melekat secara fungsional pada tupoksi pada masing-masing pejabat sampai pada level bawah. Agar pelayanan bantuan dana berjalan lancar dan bertanggungjawab atas terselenggaranya pelayanan pada masyarakat khususnya pihak sekolah dasar, agar pelaksanaannya dapat cepat dan lancar, maka sebagian tugas tersebut didelegasikan/diserahkan pada bagian-bagian atau unit-unit birokrasi pada level bawah, sehingga manajemen puncak lebih banyak berfokus pada pengambilan kebijakan secara makro yang menyangkut kepentingan pengembangan organisasi ke depan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Komunikasi merupakan salah satu faktor utama dalam implementasi kebijakan, faktor komunikasi menjadi jalur utama untuk pelaksanaan setiap program. Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang harus dimiliki oleh setiap institusi atau unit tertentu baik institusi pemerintah maupun non pemerintah, Demikian pula sebaliknya jika perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. dan Pada kasus-kasus seperti ini para pelaksana akan menggunakan keleluasaan dan kadang-kadang dengan cara halus untuk menghambat, ataupun akan mendapat keuntungan individu masing-masing dalam proses implementasi kebijakan.

Rekomendasi

- Melakukan sosialisasi sampai dengan tingkat sekolah agar sekolah lebih memahami hal-hal yang berkenaan dengan implementasi program BOS sesuai dengan Juklak yang ada, sehingga dapat menyikapi iklan sekolah gratis dengan tepat.
- Melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah (Provinsi/Kota) dalam hal mekanisme penyaluran dana BOS agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana BOS.
- Bersama-sama dengan pemerintah daerah bekerja sama merealisasikan petugas administrasi sebagai bendahara pengelola dana BOS di tingkat sekolah dasar melalui pelatihan ataupun dukungan dana.
- Pemerintah pusat maupun daerah perlu kirannya pemerintah meninjau kembali besarnya satuan dana BOS yang dihubungkan dengan tuntutan peningkatan mutu dan keadaan ekonomi secara keseluruhan. Mengingat kondisi tersebut maka dana BOS perlu ditingkatkan dengan harapan perbaikan pembelajaran dan mutu pendidikan akan semakin meningkat.
- Seyogyannya menyadari pentingnya pendidikan dasar dan menunjukkan kemauan politik untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang baik. Bukanlah pendidikan gratis yang didengung-dengungkan namun lebih tepatnya pada pendidikan murah dan bermutu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas bantuan dari berbagai pihak khususnya pembimbing yang penulis hormati Ibu Dr. Daswati, M.Si dan Bapak Dr. Nawawi Natsir, M.Si yang telah sudi meluangkan waktu dan banyak memberikan masukan serta saran arahan yang sangat bermanfaat, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik, penulis ucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2008. *Dasa-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.
- Islamy. 1994. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke-15. Bandung: Penerbit Alfabeta.